

## **Peran Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu**

**Roro Merry Chornelia Wulandary, Willy Tri Hardianto, Irenia Rinung**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: [merry.chornelia@yahoo.com](mailto:merry.chornelia@yahoo.com)

### **Abstract**

*One effort to overcome poverty through social services is the Family Hope Program (PKH). The Social Service has the authority to supervise and evaluate the distribution of PKH to the community and implement it. Knowing how social services carry out their duties and the elements that help and hinder the distribution of PKH is the main objective of this research. This research uses qualitative data collection methods in the form of observation, documentation and interviews. The stages of data reduction, data visualization, and drawing up conclusions are part of the data analysis process. Based on the research results, the Batu City Social Service has carried out its duties well in supporting the Family Hope Program (PKH). In addition to providing information and assistance, social workers also act as educators, healers, community organizers, inspirational figures, and sources of support. One form of the role of the Social Service in education is through providing teaching materials about PKH and Family Capacity Building Meetings (P2K2). Coordination with channeling institutions, namely Bank BRI and the Post Office, is one form of representation work carried out by the Social Service. Ensuring that KPM receive PKH social assistance is the main technological responsibility of the Social Service.*

**Keywords:** Batu City; Family Hope Program; Public service; Social Service;

### **Abstrak**

Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan melalui layanan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Dinas Sosial memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi penyaluran PKH kepada masyarakat serta melaksanakannya. Mengetahui bagaimana dinas sosial menjalankan tugasnya dan unsur-unsur yang membantu dan menghambat penyaluran PKH merupakan tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tahapan reduksi data, visualisasi data, dan penyusunan kesimpulan merupakan bagian dari proses analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Batu telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH). Selain memberikan informasi dan bantuan, pekerja sosial juga berperan sebagai pendidik, penyembuh, pengorganisir masyarakat, tokoh inspiratif, dan sumber dukungan. Salah satu bentuk peran Dinas Sosial dalam edukasi adalah melalui pemberian materi ajar tentang PKH dan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2). Koordinasi dengan lembaga penyalur, yaitu Bank BRI dan Kantor Pos merupakan salah satu bentuk kerja representasi yang dilakukan Dinas Sosial. Memastikan KPM menerima bantuan sosial PKH merupakan tanggung jawab teknologi utama Dinas Sosial.

**Kata kunci:** Dinas Sosial; Kota Batu; Layanan Sosial; Program Keluarga Harapan

## **PENDAHULUAN**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara kesatuan Indonesia. Salah satu tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang warga negaranya adil, cerdas, makmur, dan sejahtera (Suwatno, 2023). Namun demikian, di Indonesia, masalah kesejahteraan merupakan perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, yang mengendalikan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan, kesejahteraan, dan kesejahteraan bagi semua orang. Oleh karena itu, strategi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan terus menerus diciptakan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus terus diteliti karena sering kali berkaitan dengan masalah lainnya. Karena dilema multifaset yang terus dihadapi negara Indonesia, pertumbuhan terus meluas seiring dengan masalah kemiskinan yang telah lama ada dan terus ada dalam masyarakat modern (Pratiwi, 2022). Badan Pusat Statistik (2024) melaporkan bahwa, sejak Maret 2022 hingga saat ini, proporsi penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan telah berkurang dari 9,54% menjadi 0,17%, sementara jumlah total orang miskin telah berkurang dari 26,16 juta menjadi 0,34 juta. Menurut statistik, jika lebih banyak kebijakan dan program yang dibuat untuk orang miskin, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia akan terus menurun. Pendapatan rendah, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, masalah kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya semuanya dapat menyebabkan kemiskinan (Adiwidjaja & Suprojo, 2021)

PKH dalam penanggulangan kemiskinan merupakan strategi yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini melibatkan peningkatan kemampuan dan daya saing masyarakat miskin melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan mereka, sehingga memungkinkan mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Lebih jauh, peningkatan kesempatan kerja secara berkelanjutan merupakan keharusan. Karena hal ini dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan secara signifikan membantu elemen-elemen pembangunan ekonomi (Edu, 2019).

Inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengembangkan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan sosial untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Dukungan finansial, material, dan/atau profesional untuk keluarga dan/atau masyarakat yang miskin, kehilangan haknya, dan/atau rentan terhadap bencana sosial dikenal sebagai bantuan sosial. Menurut Pratiwi dan Imsar (2022:5684), bantuan sosial (bansos) adalah penyediaan uang jaminan sosial atau dukungan keuangan lainnya untuk melindungi masyarakat dari kehilangan pendapatan akibat kemiskinan, cacat, penyakit, usia lanjut, atau kematian. Selain itu, masyarakat setempat menawarkan berbagai layanan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di kalangan keluarga miskin. Berikut beberapa kegunaan utama PKH : 1) Mengurangi Kemiskinan. Pada poin ini kegiatannya seperti memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. 2) Meningkatkan Akses Pendidikan, pada poin ini mendorong keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anak mereka dengan memberikan bantuan untuk biaya pendidikan. 3) Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, pada poin ini PKH mewajibkan penerima manfaat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi bagi anak-anak, serta pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil. 4) Mencegah Siklus Kemiskinan Antar Generasi, banyak istilah terkait istilah ini seperti kemiskinan struktural dan sejenisnya. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, PKH membantu anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang lebih baik untuk keluar dari kemiskinan di masa depan. Memberdayakan Masyarakat Miskin. PKH juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada keluarga penerima manfaat agar mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi. Dengan adanya PKH, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat miskin dapat meningkat secara berkelanjutan dan ketimpangan sosial bisa berkurang (Liahati, 2019).

Dengan bantuan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan, Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan bagi keluarga miskin, rentan, dan sangat miskin, berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bagi mereka yang miskin dan berisiko, Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat. Setelah melalui prosedur di pangkalan data dan pusat informasi kesejahteraan sosial, keluarga yang berhak menerimanya didaftarkan dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sasaran penerima Program Keluarga Harapan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: komponen pendidikan, yaitu anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib dan terdaftar di SD atau sederajat MI, SMP atau sederajat MTS, atau SMA atau sederajat MA.

Komponen kesejahteraan sosial, yaitu penyandang disabilitas berat dan lanjut usia di atas 70 tahun; dan komponen kesehatan, yaitu anak usia 0-6 tahun dan ibu hamil serta ibu baru. Dana Program Keluarga Harapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan kepada setiap daerah yang data penduduknya dalam Statistik Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dipastikan miskin (APBN).

Berdasarkan kedudukannya di sektor pemerintahan, Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Sosial Kota Batu memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam teknis penyaluran Program Keluarga Harapan. Salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial PKH. Menurut Devi (2024), dinas sosial dan pekerja sosial memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu dalam menemukan dan menggunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Dalam sektor layanan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah yang melayani masyarakat secara langsung. Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial kepada sejumlah provinsi, termasuk Jawa Timur. Di beberapa kota di Jawa Timur, termasuk Kota Batu, bantuan sosial telah diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Salah satu tujuan pemekaran Kota Batu sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Batu yang cukup pesat, yakni dari 4,04% pada tahun 2021 menjadi 6,18% pada tahun 2022. Saat ini, Kota Batu menjadi salah satu yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat. Sementara itu, proporsi penduduk miskin di Kota Batu turun sebesar 0,48 persen poin, dari 3,79 persen pada Maret 2022 menjadi 3,31 persen pada Maret 2023 (BPS, 2024).

Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) belum terlaksana karena terdapat kesenjangan data kepemilikan, tidak tersedianya sarana pendukung, dan belum memadainya respons efektif terhadap tantangan masyarakat, menurut temuan sejumlah investigasi peneliti. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Batu, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi persoalan. Organisasi yang bertugas mengupayakan itu pun kemudian menjadi sasaran sejumlah aksi unjuk rasa. Untuk memahami mengapa masih banyak individu yang terus menolak penyaluran uang Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran, penting untuk memahami bahwa mereka yang dianggap cakap juga mendapatkan bantuan PKH, sedangkan mereka yang tidak cakap justru mendapatkan bantuan PKH (Edu, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini sebagai penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). (Sugiyono, 2021:8). Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel – variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. metodologi penelitian kualitatif menyediakan data deskriptif berdasarkan kata-kata tertulis atau lisan seseorang dan perilaku yang diamati dari kejadian nyata. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan pencatatan. Analisis data melibatkan banyak proses, termasuk reduksi data, penyajian data, pengumpulan data, penyusunan kesimpulan, dan verifikasi kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Batu**

Secara umum, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penghambat utama kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yaitu kemiskinan, PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan utamanya. Namun, karena adanya perbedaan data mengenai kondisi lapangan, kurangnya pengawasan atau pendampingan saat penyaluran PKH ke fasilitas pendamping, dan ketidakpedulian pengawas terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait penyaluran PKH, penyaluran Program Bantuan Sosial PKH di Dinas Sosial Kota Batu belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat terus menerus memberikan tekanan kepada lembaga yang melaksanakan inisiatif tersebut.

Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan PKH harus memberikan pendampingan secara menyeluruh untuk meningkatkan ketepatan penerima PKH karena hal tersebut akan berdampak langsung pada ketepatan penerima PKH. Pemerintah khususnya Kementerian Sosial terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap program PKH agar program ini tetap berjalan dengan baik dan mencapai sasarannya.

Peneliti selanjutnya menggunakan teori Jim Ife & Frank Tesoriero (2016:558–614) yang menyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga untuk melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan fungsi, tujuan, dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilaksanakan secara optimal. Empat indikasi yang meliputi peran tersebut adalah sebagai berikut: tugas teknis, representasional, instruksional, dan fasilitatif.

### **Peran memfasilitasi**

Karena layanan sosial memegang peranan penting dalam menyediakan dukungan sosial bagi masyarakat, maka Peran Fasilitatif dikhususkan bagi mereka. Dalam analisis Amalia dkk. (2024), fungsi ini meliputi semangat sosial atau animasi sosial, negosiasi dan mediasi, dukungan,



pembangunan konsensus, fasilitasi kelompok, penggunaan berbagai sumber daya dan kemampuan, pengorganisasian, dan komunikasi interpersonal. Sebagai fasilitator sosial, Dinas Sosial memberikan inspirasi dan dukungan untuk meningkatkan semangat KPM PKH. Kegiatan ini dilaksanakan pada acara Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) dengan pelaksana dan penerima manfaat PKH. Dinas sosial berperan penting dalam memberikan edukasi dan informasi kepada penerima manfaat PKH, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Batu.



**Gambar 1.** Fasilitator dan Pendamping PKH Kotra Batu

**Sumber :** Data Sekunder, 2024

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ife & Tesoriero (2016) bahwa penerima layanan sosial harus dilibatkan untuk menginspirasi dan memotivasi mereka agar bekerja secara mandiri dan mendorong orang lain untuk bergabung. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk ceramah yang menguraikan program PKH atau mendorong penerima manfaat untuk memulai usaha sendiri dalam upaya memperbaiki situasi ekonomi penerima manfaat.

Dinas Sosial berperan sebagai mediator dan negosiator dalam penyelesaian masalah di masyarakat secara adil dan tidak memihak. Berdasarkan hasil wawancara pendamping, Ibu Nurjanah menyampaikan bahwa tugas pendamping adalah mendengarkan keluhan masyarakat dan memediasi perselisihan, seperti yang menyangkut kecemburuan sosial. Hal ini senada dengan pendapat Nandini dkk. (2022) yang menekankan fungsi mitra sosial sebagai mediator yang tidak memihak. Selain itu, melalui pengorganisasian kelompok untuk merencanakan, mengorganisasi, dan berkomunikasi, Dinas Sosial juga membantu menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2).

Dinas Sosial tidak hanya berperan sebagai fasilitator dalam peningkatan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak melalui Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi juga menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kinerja, sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung KPM, dan sarana pendukung bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan PKH (Azizah dan Prathama, 2024).

Berdasarkan hasil kajian, Dinas Sosial memiliki fungsi yang sama dengan pemerintah dalam membantu operasional pemerintahan. KPM memperoleh informasi tentang penyaluran dan operasional PKH dari Dinas Sosial. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas fungsi pemerintahan, Dinas Sosial juga menunjuk pelaksana PKH, seperti koordinator dan pendamping.

Dalam skenario ini, pelaksana PKH di lapangan berperan sebagai instruktur; misalnya, mereka dapat berperan sebagai mediator atau negosiator jika terjadi perselisihan atau kesulitan; tugas pembantu mereka adalah menyelesaikan masalah tersebut secara damai.

### **Peran mendidik**

Kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan pembelajaran adalah yang menjadikan seseorang sebagai pendidik. Masyarakat penerima manfaat dalam hal ini menerima pendidikan dari Dinas Sosial di samping tugasnya sebagai fasilitator. Secara umum, masyarakat tidak menyadari layanan yang diberikan kepada mereka dan mengharapkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Akibatnya, masyarakat menjadi tergantung pada bantuan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan informasi, dan memberikan pelatihan, pemerintah harus berperan dalam situasi ini melalui Dinas Sosial.



**Gambar 2.** Pemberian Pelatihan kepada penerima PKH Kota Batu

**Sumber:** Data sekunder, 2024

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendidikannya, Dinas Sosial Kota Batu telah menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Hasil penelitian Nuraeni dkk. (2022) menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan program sembako di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai tenaga penyuluh, Dinas Sosial telah memberikan penyuluhan sembako kepada KPM melalui pertemuan langsung dan surat edaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta KPM mendapatkan penyuluhan dari pendamping, khususnya tentang nilai pendidikan kesehatan dan penyuluhan melalui diskusi kelompok serta sosialisasi hak dan tanggung jawab.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ainur Trihana, Koordinator PKH Kota Batu, saat diwawancarai. Dinas Sosial berupaya meningkatkan kemampuan KPM melalui program pelatihan kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan, kesejahteraan anak, pengasuhan dan pendidikan anak, serta pencegahan stunting yang terkait dengan fungsi pendidikan. Menurut Ibu Desi, seorang KPM, sosialisasi dan penyediaan sumber daya terkait pendidikan anak, kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan, serta keselamatan anak kerap kali diselenggarakan oleh Dinas Sosial.

## Peran representasi

Seseorang atau kelompok yang berperan sebagai representasi membantu terwujudnya suatu tujuan tertentu. Dinas Sosial berinteraksi dengan lembaga penyalur bantuan sosial, termasuk Bank BRI dan kantor pos, dalam kaitannya dengan penyaluran bantuan sosial PKH. Berdasarkan hasil penelitian Azizah dan Prathama (2024), Dinas Sosial berperan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keselamatan anak melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu tugasnya adalah melakukan pendampingan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial bekerja sama dengan dua lembaga penyalur, yaitu Kantor Pos dan Bank BRI, untuk membantu penyaluran PKH. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa lembaga sosial pemerintah, termasuk Kantor Pos dan Bank BRI, bekerja sama untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada KPM PKH.



**Gambar 3.** Penyaluran PKH melalui Kantor Pos

**Sumber:** Data Sekunder, 2023

Sebagai pelaksana PKH di daerah, Dinas Sosial bekerja sama dengan Bank BRI dan Kantor Pos untuk memudahkan Bank Penyalur dalam mentransfer dana ke rekening atas nama penerima, demikian menurut koordinator untuk Kota Batu. Fakta bahwa Dinas Sosial telah bermitra dengan bank penyalur PKH juga ditegaskan oleh Ibu Nurjanah, Pendamping Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Program Keluarga Harapan. Menurut Lumintang dan Lesawengen (2023), representasi harus bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan membujuk mereka berpartisipasi dalam inisiatif yang berpotensi tumbuh, seperti yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.

## Peran teknis

Terkait penerapan keterampilan teknis dalam pembinaan kelompok sasaran, peran teknis menjadi relevan. Salah satu tugas teknis Dinas Sosial adalah melakukan pemantauan terhadap teknis pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pemantauan tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf g, penyaluran Bansos PKH dilaksanakan dengan pengawasan setiap saat dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Pendamping PKK PKH Ibu Nurjanah dan Koordinator PKH Kota Batu Ibu Ainur Trihana. Keduanya menyampaikan bahwa setiap penyaluran bansos PKH diawasi oleh Dinas Sosial. Pemantauan terhadap layanan sosial tidak hanya dilakukan pada saat penyaluran bansos, tetapi juga pada saat kegiatan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Sebagai warga penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Ibu Sri Susanti dan

Ibu Desi menyampaikan hal tersebut dalam peran teknisnya. Mereka juga menyampaikan bahwa pemerintah turut memantau penyaluran bantuan dan kegiatan KPM PKK.

Berdasarkan hasil penelitian Azizah dan Prathama (2024) mengenai peran Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial secara teknis telah melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyaluran bansos PKH. Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis program sembako di lapangan, sebagaimana penelitian yang dilakukan Amalia dkk. (2024). Pendamping sosial juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan umum program terpenuhi selama penyaluran. Dinas Sosial melaksanakan program monitoring dan evaluasi setiap bulan di desa dan kecamatan sebagai bagian dari operasi pengawasan penyaluran bantuan program sembako di lapangan.

Temuan penelitian ini juga mendukung peran Dinas Sosial Kota Batu yaitu melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kegiatan P2K2 yang dilakukan oleh KPM dan pelaksana PKH serta penyaluran kegiatan bansos PKH pada setiap tahapan penyaluran. Temuan ini berdasarkan hasil penelitian dan wawancara sebelumnya.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Batu**

Dinas Sosial Kota Batu terlibat dalam penyaluran bansos Program Keluarga Harapan karena beberapa faktor, antara lain kerja sama Dinas Sosial dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam mengelola proses pencairan dana bansos PKH, dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pemerataan penyaluran PKH, sosialisasi yang dilakukan petugas kepada Keluarga Penerima Manfaat KPM, serta perhatian dan pengawasan dari Dinas Sosial. Tentunya, kerja sama pemerintah dalam penyaluran bansos PKH ini bertujuan untuk memperlancar penyaluran bansos sesuai dengan kewajiban pelaksana KPM, serta dukungan dan kegiatan terkait bantuan lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dan ketentuan Presiden RI tentang alokasi bansos, serta petunjuk Kementerian Sosial terkait PKH.



**Gambar 4.** Pengawasan yang kuat merupakan kunci keberlanjutan PKH  
**Sumber :** Data Sekunder, 2024

Rendahnya partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan program PKH yang dilaksanakan pemerintah menjadi kendala bagi Dinas Sosial Kota Batu untuk berperan secara setara dalam penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan. Faktor internal yang menyebabkan kendala tersebut bersumber dari kesadaran diri peserta tentang hak dan kewajibannya sebagai KPM PKH serta ketidaktahuan



mereka terhadap ketentuan KPM yang mengatur tata cara pelaksanaan program. Untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi pengetahuan tentang PKH bagi KPM, tentu saja hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah seperti Dinas Sosial atau Tim SDM PKH, atau pelaksana PKH di daerah. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Batu harus berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pelaporan diri (Pratama & Chandra, 2022). Selain itu, perlu adanya penambahan tanggung jawab kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi mitra PKH maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perbaikan sistem merupakan upaya tambahan. Agar pemanfaatan bansos PKH oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan tidak menjadi ketergantungan, misalnya, pihak-pihak yang dianggap mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dapat terlibat dalam peninjauan langsung ke lapangan, terjun langsung dalam kegiatan masyarakat KPM, atau melakukan pengawasan langsung terhadap penyaluran bansos.

## KESIMPULAN

Dinas Sosial Kota Batu telah melaksanakan tugas dengan baik dalam penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator, Dinas Sosial memberikan informasi, memberikan inspirasi dan dorongan, melakukan mediasi dan tawar-menawar, serta membina hubungan antar sesama. Dinas Sosial menyediakan sumber daya tentang PKH dan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) sebagai bagian dari tujuan pengajarannya. Dalam rangka menyelenggarakan tugas representasi, Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga penyalur, yaitu Bank BRI dan Kantor Pos. Dari segi tugas teknis, penyaluran bansos PKH oleh KPM secara teknis menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu disalurkan Dinas Sosial dengan dukungan dari berbagai sumber. Di antaranya Dinas Sosial dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bekerja sama mengelola pencairan dana; dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin pemerataan penyaluran PKH; program sosialisasi yang diberikan petugas Dinas Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); dan perhatian serta pemantauan krusial yang diberikan pendamping peserta agar penerima manfaat dapat meningkatkan kualitas ke depannya. Sementara itu, Dinas Sosial menghadapi tantangan dalam penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu, antara lain rendahnya partisipasi KPM dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap program pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaja, I., & Suprojo, A. 2021. Pelayanan di Dinas Sosial Kota Batu dalam Penyaluran Dan Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Miskin (PKH). *Reformasi*, 11(2), 226-232.
- Amalia, A. R. D., Subowo, A., & Santoso, R. S. (2024). Peran Pendamping Sosial Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 672-687.
- Azizah, P. N., & Prathama, A. (2024). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). *Journal Publicio*, 7(2), 695-704.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>, diakses 12 Desember 2024.

- Edu, E., & Rohman, A. 2019. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 67-74.
- Ife, J & Tesoriero, F., 2016. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Edisi 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liahati, L., & Larasati, D. C. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(2).
- Lumintang, J., & Lesawengen, L. (2023). Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senja Cerah". *Jurnal Ilmiah Society*, 3(2).
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74.
- Nuraeni, S., Rachmawati, I., & Nur, T. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Program Sembako Di Kabupaten Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 143-148.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
- Pratama, F. F., & Chandra, D. (2022). Dampak Strategis Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan pada Masa Pandemi COVID-19 melalui Program PKH di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 63-76.
- Pratiwi, D. C., & Imsar, I. 2022. Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5684-5690.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwatno. (2023). Demokrasi Pancasila dalam UUD 1945. *Jurnal Majelis MPR RI*, edisi 2, 67-87.